

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Sebagai tindak lanjut amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan merupakan perwujudan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar semoga dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pemerintahan.

Benteng, 2 Februari 2022

Plt. KEPALA BADAN,



Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19740626 199311 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, yang mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yang mana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan tugasnya tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusun kebijakan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan;
4. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

5. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
6. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
7. Pengoordinasian penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lainnya;
8. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
9. Pelaksanaan sistem akuntansi daerah;
10. Pelaksanaan pemungutan Pajak daerah dan retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
11. Pengoordinasian pemungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang dikelola oleh SKPD lainnya;
12. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang

capaiannya 100% yaitu indikator kinerja nilai Lakip, indikator kinerja ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Selayar dan indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dan ada 1 (satu) indikator kinerja yang pencapaiannya di bawah 100% yaitu indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk indikator kinerja nilai Lakip dan indikator kinerja opini BPK dinilai berdasarkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	4
D. Isu-isu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Indikator Kinerja Utama	24
C. Rencana Kerja Tahunan	28
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	61
A. Pengukuran Kinerja	59
B. Analisis Capaian Kinerja	63
C. Realisasi Keuangan	89
BAB IV PENUTUP	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	22
Tabel 2 : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Daerah Tahun 2021	25
Tabel 3 : Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran	28
Tabel 4 : Sasaran, Indikator Kinerja Utaman dan Target	61
Tabel 5 : Capaian Indikator Kinerja Utama	62
Tabel 6 : Indikator Kinerja Utama (IKU 1)	64
Tabel 7 : Indikator Kinerja Utama (IKU 2)	69
Tabel 8 : Indikator Kinerja Utama (IKU 3)	72
Tabel 9 : Indikator Kinerja Utama (IKU 4)	77
Tabel 10: Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021	79
Tabel 11: Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2021	81
Tabel 12: Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2021	84
Tabel 13: Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	

Yang Dipisahkan Tahun 2021	86
Tabel 14: Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2021	87
Tabel 15: Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Tahun 2021	89
Tabel 16: Penyerapan terhadap pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021	90
Tabel 17: Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021	91
Tabel 18: Realisasi Target Anggaran per Program per Kegiatan	93

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 : Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021	92
Grafik 2 : Persentase Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya. Untuk membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Terjadi perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari “ berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “ berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai”. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan dan kinerja.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati. LAKIP perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai merupakan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Menggambarkan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Reviu Rencana Strategis serta tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.

Tujuan penyusunan adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, hal ini akan menjadi laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

1. Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan tugasnya tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sebagai perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan tersebut maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusun kebijakan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan;
4. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
6. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
7. Pengoordinasian penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lainnya;
8. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
9. Pelaksanaan sistem akuntansi daerah;

10. Pelaksanaan pemungutan Pajak daerah dan retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
11. Pengoordinasian pemungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang dikelola oleh SKPD lainnya;
12. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Struktur Organisasi

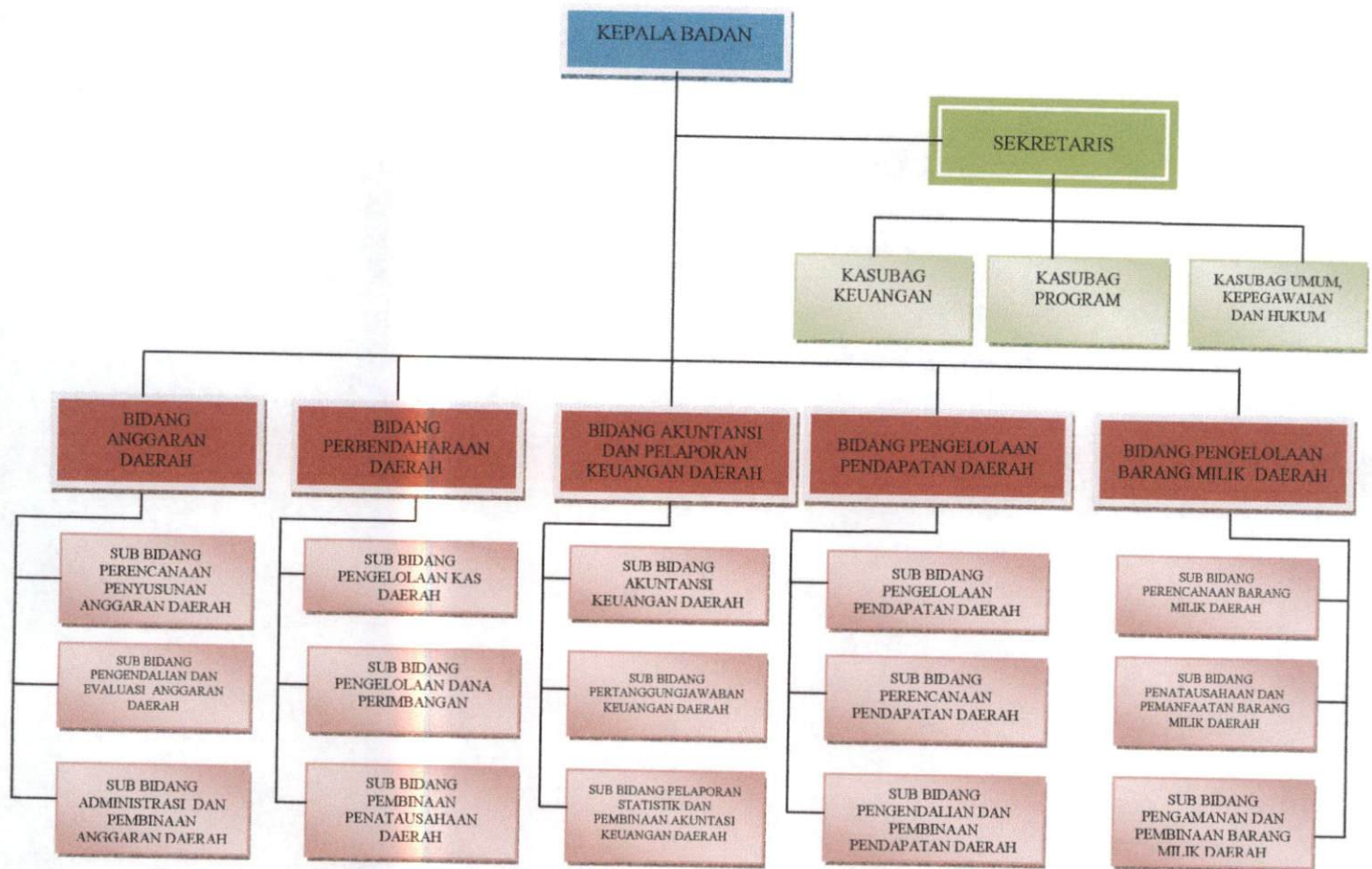
Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Badan
- II. Sekretaris, terdiri atas :
 1. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 2. Sub. Bagian Program; dan
 3. Sub. Bagian Keuangan.

- III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah
 - 3. Sub Bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah
- IV. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan
 - 3. Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
- V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
 - 2. Sub Bidang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
 - 3. Sub Bidang Pelaporan Statistik dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah
- VI. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
 - 2. Sub Bidang Pengembangan & Pelayanan Pendapatan Daerah
 - 3. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah
- VII. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah

2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
3. Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR



4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung oleh 57 orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2.

a. Berdasarkan golongan ruang

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	0
3	Pembina (IV/a)	6
3.	Penata Tingkat I (III/d)	13
4.	Penata (III/c)	8
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	8
6.	Penata Muda (III/a)	8
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	10
8.	Pengatur (II/c)	2
9.	Pengatur (II/b)	1
JUMLAH		57

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	7
2.	S1	33
3.	D III	2
4.	SMA	15
JUMLAH		57

c. Berdasarkan jenis kelamin

No	Golongan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	IV	4	3
2.	III	17	20
3.	II	3	10
JUMLAH		24	33

Data personil berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 40 orang (70,17%), Diploma III sebanyak 2 orang (3,51%) Sekolah Menengah Atas sebanyak 15 orang (26,32%). Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan.

D. Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar masih menemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini dapat ditemui dalam pelaksanaan pelayanan berdasarkan Tugas dan Fungsi di masing-masing Bidang sebagai Unit Kerja di Lingkup BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut akan teridentifikasi isu-isu strategis yang akan berpengaruh pada perkembangan kinerja Badan dan akan dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam terhambatnya kinerja Badan, untuk segi positifnya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi faktor pendorong dari BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga akan teridentifikasi pula potensi-potensi yang ada.

Berikut ini berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam menjalankan Tugas dan Fungsi BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar

sebagai Lembaga Teknis Daerah yang menjalankan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. Bidang Anggaran Daerah :
 - a. Proses penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam peraturan yang berlaku;
 - b. Kurangnya instrumen penganggaran/ Peraturan/ Juklak/ Juknis/ SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD;
 - c. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
 - d. Masih kurang jelasnya alur penyusunan anggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
 - e. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi/ verifikasi dalam memeriksa/ memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD

2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah :

- a. Masih banyak SDM Pengelola Akuntansi di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi sehingga masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan;
- b. Peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah masih harus adanya penyesuaian;
- c. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.

3. Bidang Perbendaharaan Daerah :

- a. SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun;
- b. Masih tidak berjalannya Revolving Uang Persediaan (UP) di beberapa SKPD;
- c. Belum tertibnya pelaporan perpajakan pusat baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kantor Pelayanan Pajak;

- d. Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bank;
- e. Belum adanya mekanisme penerbitan SP2D untuk kelebihan pembayaran;
- f. Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD;
- g. Masih kurangnya instrumen Peraturan/ Juklak/ Juknis yang digunakan dalam proses penerimaan dan pengeluaran APBD.
- h. Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.
- i. Lambatnya laporan pemutakhiran data pegawai terkait dengan gaji dan tunjangan anak sehingga sering terjadi kelebihan pembayaran tunjangan keluarga di mana sebagian besar ditemukan oleh auditor, dikarenakan SKPD kurang menanggapi respon tersebut dengan baik
- j. Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai dengan 20 tahun

- k. Belum tersedianya aplikasi penggajian yang memadai dan belum adanya sarana penunjang pemeliharaan aplikasi penggajian Kabupaten Kepulauan Selayar
- 4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah :
 - a. Belum adanya Road Map untuk menyelesaikan permasalahan aset
 - b. Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai
 - c. Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD;
 - d. Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum optimal terkait warkah bukti kepemilikan
 - e. Prosedur pencatatan BMD belum memadai;
 - f. Belum optimalnya sinergitas sistem aplikasi pengelolaan aset untuk mendukung laporan keuangan secara akrual
 - g. Prosedur penilaian BMD belum memadai
 - h. Masih rendahnya kesadaran penyewa lahan fasos/fasum terhadap kewajiban dalam membayar retribusi;

5. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Belum optimalnya Pengelolaan potensi sumber –sumber pendapatan daerah
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan daerah
- c. Masih rendahnya kompetensi aparatur tentang perpajakan daerah
- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi
- e. Belum optimalnya Pengelolaan PBB P2
- f. Masih rendahnya kompetensi aparatur tentang PBB P2

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merumuskan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun berjalan secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Komponen utama dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah meliputi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan visi dan misi keberhasilan organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka pada dokumen Renstra dirumuskan kebijakan dan program yang diambil oleh organisasi.

a. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berpedoman kepada Visinya yaitu : **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel”**.

Sedangkan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan yaitu sebagai titik tolak ukur bagi perumusan strategi organisasi, selain itu berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan skala prioritas, kebijakan organisasi, penyusunan program dan penentuan alokasi sumber daya adalah sebagai berikut : “

Misi 1 : Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib.

Misi 2 : Peningkatan kemandirian keuangan daerah.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Tujuan yang akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, bersih dan berwibawa
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel

3. Meningkatkan pendapatan daerah sesuai target yang ditetapkan berdasarkan potensi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran tersebut di atas digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.
Tujuan dan Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

TUJUAN		SASARAN	
NO	URAIAN	NO	URAIAN
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, bersih dan berwibawa	1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
2.	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	2.1	Meningkatnya Pelaksanaan APBD setiap tahun yang efektif
		2.2	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3.	Meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai potensi yang tersedia	3.1	Tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah sesuai potensi yang tersedia

c. Strategi

Rumusan strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan penrimaaan pajak dan retribusi daerah
3. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu
4. Optimalisasi pengelolaan aset daerah secara terpadu.

d. Arah Kebijakan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat diambil beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain :

1. Meningkatkan tata kelola internal organisasi pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)

2. Mengoptimalkan pendataan wajib pajak daerah dan peningkatan pelayanan perpajakan serta tata kelola sumber-sumber retribusi daerah secara terpadu
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan dan administrasi penganggaran
4. Mengoptimalkan rangkaian proses pengelolaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset serta penatausahaan aset daerah.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memuat informasi tentang tugas, fungsi, kinerja utama, indikator kinerja utama disertai penjelasan dan sumber data yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama sebagai berikut ;

Tabel 2.
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tugas	: Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Fungsi	1. Penyusun kebijakan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah; 2. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 3. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan; 4. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 5. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah; 6. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD); 7. Pengoordinasian penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lainnya; 8. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 9. Pelaksanaan sistem akuntansi daerah; 10. Pelaksanaan pemungutan Pajak daerah dan retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 11. Pengoordinasian pemungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang dikelola oleh SKPD lainnya; 12. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	AA = Sangat Memuaskan A = Memuaskan BB = Sangat Baik B = Baik CC = Cukup C = Kurang D = Sangat Kurang	Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Meningkatnya pelaksanaan APBD setiap tahun yang efektif	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Selayar	Tanggal ditandatangani persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang Raperda APBD dibanding dengan waktu persetujuan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang Raperda APBD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dokumen RAPBD
Meningkatnya pelaksanaan APBD setiap tahun yang efektif	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Selayar	Tanggal ditandatangani persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang Raperda APBD dibanding dengan waktu persetujuan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang Raperda APBD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dokumen RAPBD

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

Meningkatnya kualitas laporan keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK : WTP = Wajar Tanpa Pengecualian, merupakan predikat tertinggi opini BPK yang berarti Pengelolaan keuangan daerah sudah sangat baik. WDP = Wajar Dengan Pengecualian, merupakan predikat menengah opini BPK yang berarti pengelolaan daerah cukup baik, tapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Disclaimer = Merupakan predikat terendah dari opini BPK yang berarti pengelolaan keuangan Daerah buruk, banyak yang harus diperbaiki.	Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tercapainya target pendapatan asli daerah sesuai potensi daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	Realisasi PAD dibagi target PAD dikali 100 %	Buku Laporan Keuangan BPKPAD

C. Rencana Kerja Tahunan

Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun selaras dengan Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja.

Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 3.

Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
NO	URAIAN	NO	URAIAN	
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Nilai LAKIP perangkat daerah	CC
2.	Meningkatnya pelaksanaan APBD setiap tahun yang efektif	2.1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Selayar	Tepat Waktu

3.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan	3.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
4.	Tercapainya target pendapatan asli daerah sesuai potensi daerah	4.1	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021. Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada mulai eselon II, eselon III, dan eselon IV sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA BPKPD	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
	2. Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Selayar	Tepat Waktu
	3. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %
4. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Lakip Perangkat Daerah	CC

NO PROGRAM

ANGGARAN

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	28.421.805.896,00
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	160.064.783.000,00
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	822.520.000,00
4. Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.160.377.700,00

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR



H. MUH. BASLI ALI

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KEPALA BADAN



Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740626 199311 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**SEKRETARIS BADAN**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tercapainya Peningkatan Kinerja dan Kualitas Pelayanan	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	100%
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang Tersedia Sesuai Kebutuhan	100%
Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Handal	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%
Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun Sesuai Jadwal	12 Laporan
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai Lakip Perangkat Daerah	CC

NO KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 28.421.805.896,00

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KEPALA BADAN,

Plt. SEKRETARIS BADAN

Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740626 199311 1 002

HUSAIN, S.Sos

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19710623 199402 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tercapainya Pelaksanaan APBD yang Efektif	Penetapan APBD	Tepat Waktu
Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah	Jumlah SKPD yang Terfasilitasi Penyusunan RKA dan DPA	45 SKPD / 2 Kali
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan APBD	Jumlah SKPD yang Terkendali Pelaksanaan APBD	45 SKPD / 12 Bulan
Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan dan Pelaporan APB Desa	81 Desa

NO KEGIATAN

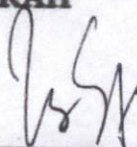
ANGGARAN

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.500.170.000,00 |
| 2. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 157.193.527.000,00 |

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KEPALA BADAN

Plt. KABID. ANGGARAN DAERAH



Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.

WAHYUNINGSIH, S.E., M.M.

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740626 199311 1 002

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19780213 200803 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Terlaksananya Penatausahaan, Penerimaan dan Pengeluaran PPKD	Pelaksanaan Fungsi dan Pelayanan PPKD Penatausahaan dan Fungsi BUD	12 Bulan
Pengoprasian Sistem Aplikasi Pengelolaan Gaji	Jumlah SKPD yang Mendapatkan Pelayanan	45 SKPD/ 12 Bulan

NO KEGIATAN

ANGGARAN

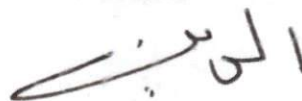
1. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

623.100.000,00

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KEPALA BADAN

**Plt. KABID. PERBENDAHARAAN
DAERAH**



Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740626 199311 1 002

HAERUDDIN YUSUF, S.H

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19630630 199401 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Handal	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%
Tercapainya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai SAP Berbasis Akrua	Jumlah SKPD yang Mendapatkan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan	45 SKPD/ 12 Bulan

NO KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|---|----------------|
| 1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 647.986.000,00 |
| 2. Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 100.000.000,00 |

PLT. KEPALA BADAN



Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740626 199311 1 002

Benteng, 04 Januari 2021

**Plt. KABID. AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN
DAERAH**



NURSALIKHSAN, S.E.M.Ak., M.Si

Pangkat : Penata Tk.I,III/d
NIP. 19830525 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tercapainya Sistem Pelaporan Barang Milik Daerah yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	45 SKPD/ 1 Kali
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah dalam Sistem Informasi Barang Milik Daerah	Jumlah Data Barang Milik Daerah yang Terupdate Dalam Sistem Aplikasi SIMDA BMD	45 SKPD/ 12 Bulan

NO KEGIATAN

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

ANGGARAN

822.520.000,00

Plt. KEPALA BADAN



Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740626 199311 1 002

Benteng, 04 Januari 2021

**Plt. KABID. PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH**



NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720804 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 % (Target PAD tahun 2021 sebesar Rp. 87.072.440,-)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah SKPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 SKPD Pengelola PAD

NO KEGIATAN

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

ANGGARAN

2.160.377.700,00

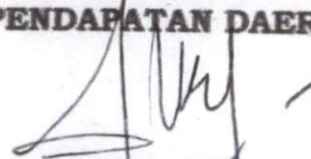
Plt. KEPALA BADAN



Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740626 199311 1 002

Benteng, 04 Januari 2021

**Plt. KABID. PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH**



A. RUMBIYAH MANAJAL, S.P.M.M
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 19751031 200604 2 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KASUBAG. PROGRAM

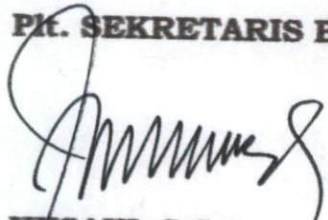
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai Lakip Perangkat Daerah	CC
Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) BPKPD	Jumlah Dokumen yang Disusun	1 dokumen
Tersusunnya RKA/DPA BPKPD	Jumlah Dokumen yang Disusun	2 dokumen
Tersedianya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan yang Tersusun	12 Laporan

NO SUB KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|--|---------------|
| 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.040.000,00 |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10.000.000,00 |
| 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 7.000.000,00 |
| 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 10.000.000,00 |
| 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 7.000.000,00 |
| 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.000.000,00 |
| 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.490.000,00 |

Plt. SEKRETARIS BADAN


HUSAIN, S.Sos

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19710623 199402 1 003

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KASUBAG. PROGRAM


SRI ASTINA, SP

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP. 19800411 200312 2 006

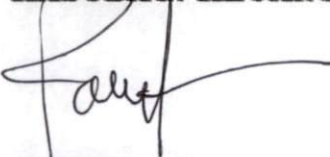
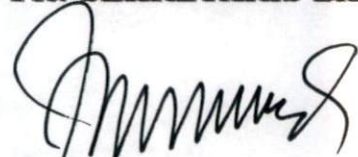
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**KASUBAG. KEUANGAN**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarkan	12 Bulan
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Disusun	12 Laporan
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	1 Laporan
Tersusunnya Laporan RFK BPKPD	Jumlah Laporan RFK yang Disusun	12 Laporan
Terlaksananya Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	3 Laporan

NO KEGIATAN**ANGGARAN**

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 20.345.400.000,00 |
| 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 10.000.000,00 |
| 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 20.300.000,00 |
| 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 15.000.000,00 |
| 5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 10.000.000,00 |

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS BADAN**KASUBAG. KEUANGAN****HUSAIN, S.Sos****RITAWATI, S.S**

Pangkat : Pembina, IV/a

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19710623 199402 1 003

NIP. 19831229 201101 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Terpenuhinya Pembayaran Rekening	Jenis dan Bukti Pembayaran	4 Jenis (Telpon/wifi, TV Kabel, Air dan Listrik)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan yang Tersedia	7 Jenis/ 12 Bulan (Koran)
Terlaksananya Kooordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	12 Bulan
Tersedianya Makanan dan Minuman	Rapat dan Tamu yang disediakan Makanan dan Minuman	12 Bulan
Tersedianya Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang Tersedia	12 Bulan
Tersedianya Barang Cetak	Jenis Barang Cetak yang Tersedia	4 Jenis
Terpenuhinya Peralatan Kantor yang Memadai	Peralatan Kantor yang Terpelihara	1 Kegiatan
Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	1 Kegiatan
Terpeliharanya Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Gedung/ 12 Bulan
Terpeliharaya Kendaraan Operasional / Dinas	Jenis dan Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terpelihara	Roda 4 (Empat) 7 Unit & Roda 2 (Dua) 66 Unit

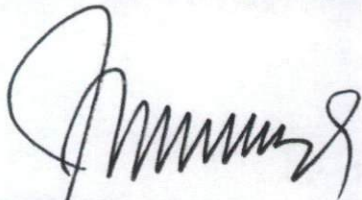
NO SUB KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000,00
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99.000.000,00
3. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00
4. Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.000.000,00
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	50.000.000,00
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	206.499.000,00
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	167.000.000,00
9. Pengadaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	43.000.000,00
10. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	24.000.000,00
11. Fasilitas Kunjungan Tamu	103.300.000,00
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	563.031.000,00
13. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.320.000,00
14. Pengadaan Mebeler	28.526.000,00
15. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	3.945.554.596,00
16. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00
17. Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.051.872.300,00
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	402.110.000.000,00

19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000,00
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.855.000,00

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS BADAN

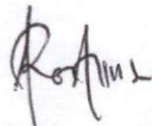


HUSAIN, S.Sos

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19710623 199402 1 003

**Plt. KASUBAG. UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM**



ROSNIAH, SE.MM

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP. 19750404 201101 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASUBID. PENGENDALIAN DAN EVALUASI ANGGARAN DAERAH

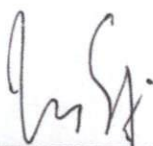
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tercapainya Pelaksanaan APBD yang Efektif	1. Penetapan APBD 2. Penetapan APBD Perubahan	Tepat Waktu Tepat Waktu
Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah	Jumlah SKPD yang Terfasilitasi Penyusunan RKA dan DPA	45 SKPD/ 2 Kali
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan APBD	Jumlah SKPD yang Terkendali Pelaksanaan APBD	45 SKPD/ 12 Bulan

NO KEGIATAN

1. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
7. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

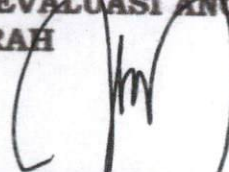
Benteng, 04 Januari 2021

**Plt. KABID. ANGGARAN
DAERAH**



WAHYUNINGSIH, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19780213 200803 2 002

**Plt. KASUBID. PENGENDALIAN
DAN EVALUASI ANGGARAN
DAERAH**



NUR SOFYANSYAH, S.STP., Map.
Pangkat : Penata, III/c
NIP. 19920126 201206 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

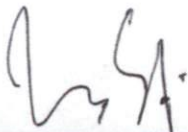
KASUBID. ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN ANGGARAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dan Jenis Dokumen Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	81 Desa (1 ADD dan 1 DDS)
	Jumlah Desa yang Terverifikasi Dokumen SPP Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	81 Desa / 12 Bulan
Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dan Jenis Laporan Realisasi Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak	1 Dokumen
Terlaksananya Penyaluran Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	81 Desa/3 Bulan

NO SUB KEGIATAN

1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

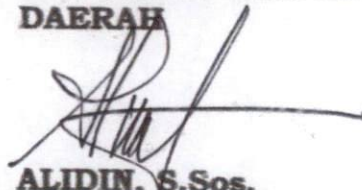
**Plt. KABID. ANGGARAN
DAERAH**



WAHYUNINGSIH, S.E., M.M.
Pangkat: Pembina, IV/a
NIP. 19780213 200803 2 002

Benteng, 04 Januari 2021

**Plt. KASUBID. ADMINISTRASI
DAN PEMBINAAN ANGGARAN
DAERAH**



ALIDIN, S.Sos.
Pangkat : Penata Tk.I,III/d
NIP. 19720714 199303 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

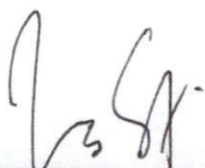
KASUBID. PERENCANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tercapainya Pelaksanaan APBD yang Efektif	1. Nota Kesepakatan KUA dan PPAS 2. Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan 3. Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran, Belanja dan Pembiayaan	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen (Pokok dan Perubahan)

NO KEGIATAN

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
4. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
6. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

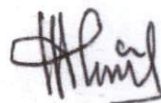
Plt. KABID. ANGGARAN DAERAH



WAHYUNINGSIH, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19780213 200803 2 002

Benteng, 04 Januari 2021

**KASUBID. PERENCANAAN
PENYUSUNAN ANGGARAN
DAERAH**



NUR BAETI, S.E
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 19730529 200701 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KASUBID. PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Terlaksananya Penatausahaan, Penerimaan dan Pengeluaran PPKD	Pelaksanaan Fungsi dan Pelayanan PPKD Penatausahaan dan Fungsi BUD	12 Bulan

NO SUB KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|---|----------------|
| 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga | 25.000.000,00 |
| 2. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 55.000.000,00 |
| 3. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 102.500.000,00 |

Benteng, 04 Januari 2021

**Plt. KABID. PERBENDAHARAAN
DAERAH**

**Plt. KASUBID. PEMBINAAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH**



HAERUDDIN YUSUF, S.H.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19630630 199401 1 002



ZULFADLI, A.Md
Pangkat : Penata, III/c
NIP. 19780612 200604 1 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KASUBID. PENGELOLAAN KAS DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Pengoperasian Sistem Aplikasi Penerbitan SPD dan SP2D	Jumlah SKPD yang Mendapatkan Pelayanan	365 SPD 6.500 SP2D
	Jumlah Pengelolaan Aplikasi Penerbitan SP2D	1 Aplikasi

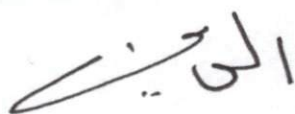
NO SUB KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|--|----------------|
| 1. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 12.366.000,00 |
| 2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 65.134.000,00 |
| 3. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 30.000.000,00 |
| 4. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas | 120.000.000,00 |

Benteng, 04 Januari 2021

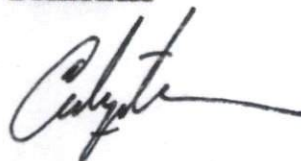
**Plt. KABID. PERBENDAHARAAN
DAERAH**



HAERUDDIN YUSUF, S.H.

Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19630630 199401 1 002

**Plt. KASUBID. PENGELOLAAN
KAS DAERAH**



ANDI FITRIANI, S.E

Pangkat : Penata, III/c
NIP. 19820905 200903 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KASUBID. PENGLOLAAN DANA PERIMBANGAN

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)		(2)	(3)
Terlaksananya Penatausahaan Gaji SKPD		Jumlah Sistem Aplikasi Penatausahaan Gaji	1 Aplikasi
Terlaksananya Pengelolaan Dana JKK dan JKM		Terlaksananya Dana JKK dan JKM	12 Bulan
Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Antara BUD dan Daerah		Terlaksananya Pelaporan Belanja Daerah	12 Laporan

NO SUB KEGIATAN

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
3. Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

108.100.000,00
50.000.000,00
55.000.000,00

ANGGARAN

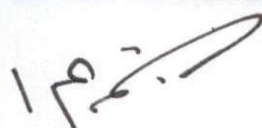
Benteng, 04 Januari 2021

Pt. KASUBID. PENGLOLAAN DANA PERIMBANGAN



EMMA, S.E.
Pangkat : Penata, III/c
NIP. 19780518 201410 2 001

Pt. KABID. PERBENDAHARAAN DAERAH



HAERUDDIN YUSUF, S.H
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19630630 199401 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASUBID. AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai SAP Berbasis Akrua	Jumlah SKPD yang Mendapatkan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan	45 SKPD/ 12 Bulan
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Jenis Dokumen yang Tersusun	2 Dokumen (1 Ranperda dan 1 Rancangan Peraturan Bupati Kep. Selayar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)
Terlaksananya Evaluasi atas Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja	Jumlah Dokumen yang Dievaluasi	1 Dokumen (Perbup Analisis Standar Belanja)

NO SUB KEGIATAN

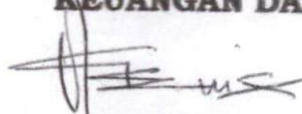
1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
2. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
3. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
5. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
6. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

**Plt. KABID. AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

NURSAL IKHSAN, S.E.M.Ak., M.Si.

Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 04 Januari 2021
**Plt. KASUBID. AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH**



BASNIATY, S.E

Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 19790916 200502 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KASUBID. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Terlaksananya Focus Group Discusion (FGD)	1 Kali
Terlaksananya Bimbingan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	150 Orang
Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Perbup Analisis Standar Belanja	Jumlah SKPD yang Mengikuti Sosialisasi	45 SKPD

NO SUB KEGIATAN

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah
2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota

**Plt. KABID. AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

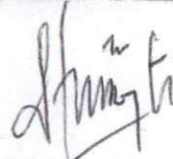


NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.M.Si.

Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 04 Januari 2021

**Plt. KASUBID.
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH**



Hj. SHUGIRAWATI, S.E

Pangkat : Penata, III/c
NIP. 19800220 200903 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KASUBID. PELAPORAN STATISTIK DAN PEMBINAAN AKUNTANSI DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai SAP Berbasis Akrua	Jumlah SKPD yang Mendapatkan Pendampingan Penyusunan Neraca Saldo dan Neraca Daerah	45 SKPD/ 1 Kali

NO KEGIATAN

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah

**Plt. KABID. AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

NURSAL IKHSAN, S.E.M.AK., M.Si.

Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 04 Januari 2021

**Plt. KASUBID. PELAPORAN
STATISTIK DAN PEMBINAAN
AKUNTANSI DAERAH**

JUMRIATI, S.E.

Pangkat : Penata, III/c
NIP. 19770925 201001 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KASUBID. PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Dalam Sistem Informasi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang tercatat pada Setiap Perangkat Daerah	1 Laporan
	Jumlah Laporan penggunaan, pemanfaatan dan Pemindahan Barang	1 laporan
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
Terlaksananya Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Data Barang SKPD	1 Laporan
	Tersusunnya Neraca Aset Tetap Per OPD	45 SKPD/ 1 Laporan
	Tersusunnya Neraca Aset Tetap Tahun Anggaran Berjalan	1 Laporan
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Barang Milik Daerah (Jalan, Jaringan dan Irigasi) yang Diverifikasi dan Diinventarisasi	3 SKPD/ 1 Laporan
Terlaksananya Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Laporan

NO KEGIATAN

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah
2. Inventarisasi Barang Milik Daerah
3. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kepulauan Selayar
4. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Benteng, 04 Januari 2021

**Plt. PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH**



NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19720804 200312 1 006

**Plt. KASUBID. PENATAUSAHAAN
DAN PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH**



WINARNI SURUNG, S.Sos.

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19780214 200903b2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KASUBID. PERENCANAAN BARANG MILIK DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBUSKPD yang Disusun	1 Laporan
	Jumlah RKPBUSKPD yang Disusun	1 Laporan
	Jumlah Laporan Perencanaan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan
Terlaksananya Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Standar Satuan Harga	1 Dokumen
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	1 Dokumen

NO KEGIATAN

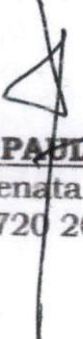
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
2. Penyusunan Standar Satuan Harga
3. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

**Plt. PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH**


NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720804 200312 1 006

Benteng, 04 Januari 2021

**Plt. KASUBID. PERENCANAAN
BARANG MILIK DAERAH**


DJAMRUK PAULA LATIF, S.H
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 19720720 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KASUBID. PENGAMANAN DAN PEMBINAAN BARANG MILIK DAERAH

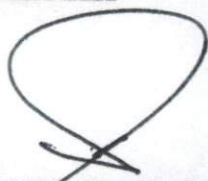
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan
Terlaksananya Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab/Kota	Jumlah SKPD yang Mengikuti sosialisasi	45 SKPD

NO KEGIATAN

1. Pengamanan Barang Milik Daerah
2. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
3. Pembinaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

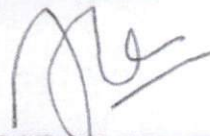
Benteng, 04 Januari 2021

**Plt. PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH**



NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720804 200312 1 006

**Plt. KASUBID. PENGAMANAN
DAN PEMBINAAN BARANG
MILIK DAERAH**



H. ROSDAN CHAERAN, S.E.
Pangkat : Penata, III/c
NIP. 19750718 201410 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

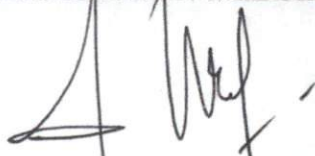
KASUBID. PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Wajib Pajak dan Pengelola Retribusi Daerah yang Patuh Terhadap Peraturan Daerah	146 Wajib Pajak 12 Pengelola Retribusi Daerah
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 %

NO SUB KEGIATAN

1. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
2. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

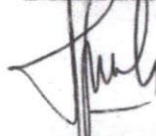
**Plt. KABID. PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH**



A. RUMBIYAH MANAJAI, S.P.,MM
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 19751031 200604 2 019

Benteng, 04 Januari 2021

**Plt. KASUBID. PENGENDALIAN
DAN PEMBINAAN PENDAPATAN
DAERAH**



AKHMAD JUNAEDI, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 19800307 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KASUBID. PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi dan Rekonsiliasi	4 Kali / 12 Bulan
	Terlaksananya Koordinasi Antar SKPD Pengelola PAD	12 SKPD Pengelola PAD
	Jumlah Piutang yang tidak Dapat Ditagih, Kadaluarsa dan Dihapus	6.598 PBB 4 wajib pajak (piutang) 280 Dihapus

NO SUB KEGIATAN

1. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
3. Penagihan Pajak Daerah
4. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

**Plt. KABID. PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH**



A. RUMBIYAH MANAJAI, S.P.,MM

Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 19751031 200604 2 019

Benteng, 04 Januari 2021

**Plt. KASUBID. PENGEMBANGAN
DAN PELAYANAN PENDAPATAN
DAERAH**



ASPA, S.Sos.

Pangkat : Penata Muda Tk.I, III/b
NIP. 19821228 200701 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Plt. KASUBID. PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Subjek dan Objek Pajak Daerah yang Terdata	82.234 Wajib Pajak
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	4 Kali/ 12 Bulan
	Jumlah Aplikasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Terpelihara	2 Aplikasi (Aplikasi Mapatda dan Aplikasi Sismiop)
Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah yang Terlaksana	5 Kec.

NO SUB KEGIATAN

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6. Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Penetapan Wajib Pajak Daerah

**Plt. KABID. PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH**

A. RUMBIYAH MANAJAI, S.P.,MM

Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 19751031 200604 2 019

Benteng, 04 Januari 2021

**Plt. KASUBID. PERENCANAAN
PENDAPATAN DAERAH**

ASRI ANSAR, S.E.

Pangkat : Penata Muda Tk.I, III/b
NIP. 19800520 201503 1 003

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance yang mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021; dan
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2021 dinilai melalui pengukuran pencapaian target Renstra 2016-2021. Pada Tahun Anggaran 2020, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah menyelenggarakan beberapa kegiatan atau aktifitas sesuai dengan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021, yang merupakan bagian dari Rencana Strategis.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.
Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
NO	URAIAN	NO	URAIAN	
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Nilai LAKIP perangkat daerah	CC
2.	Meningkatnya pelaksanaan APBD setiap tahun yang efektif	2.1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Selayar	Tepat Waktu
3.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan	3.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
4.	Tercapainya target pendapatan asli daerah sesuai potensi daerah	4.1	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	100%

Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang tata usaha pelaksana keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah telah melaksanakan beberapa capaian kinerja dengan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukurnya dengan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
			2020			2021		
1	2	3	7	8	9			
1	Nilai LAKIP perangkat daerah	Nilai	CC	CC	58,02	CC		
2	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Selayar	-	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
3.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	100%	WTP		
4.	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	Persen	100%	78,38%	78,38%	100%	45,82%	45,82%

Dari uraian tabel diatas, tergambar bahwa dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang capaian kinerjanya 100% yaitu ketepatan waktu penyusunan RAPBD sedangkan capaian kinerja peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar 45,82% hal ini disebabkan salah satunya berkurangnya retribusi dari pajak hotel dan restoran, dimana kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi corona virus 19 maka Hotel dan Restoran tidak diizinkan beroperasi sebagaimana mestinya (penjabaran lebih terinci pada penjelasan IKU 4). Terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Lakip Perangkat Daerah untuk Tahun 2021 dan Opini BPK terhadap laporan keuangan akan dijabarkan pada Lakip Tahun Anggaran berikutnya sehingga yang terjabar pada Lakip 2021 adalah nilai tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020. Hal ini dikarenakan Nilai Lakip Perangkat Daerah tahun 2021 dinilai pada tahun berikutnya sedangkan Opini BPK terhadap laporan keuangan saat ini masih sedang berjalan.

B. Analisa Capaian Kinerja

Pada akhir tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan seluruh kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan berdasarkan

Tabel 7.
Indikator Kinerja Utama (IKU 2)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
			2020			2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Selayar	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu (100%)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu (100%)

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 disusun dan dikoordinator oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku PPKD. Tujuan dari penyusunan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat selama periode tahun 2021.

Analisa Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2021

Dasar hukum penyusunan APBD Tahun 2021 adalah Peraturan Menteri Dalam Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Kegiatan ini telah menyusun rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, serta telah dilaksanakan pembahasan-pembahasan dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penandatanganan Surat Persetujuan Bersama pada tanggal 30 Desember 2020. Setelah rancangan peraturan daerah tersebut dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan dilakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 sesuai hasil evaluasi, maka pada tanggal 30 Desember 2020 rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021.

- Penyusunan rancangan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 telah dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 8.
Indikator Kinerja Utama (IKU 3)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
			2020			2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	-	-

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2004 bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi

mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lingkup Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan negara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Entitas Pemeriksa Laporan Keuangan pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Dalam kaitannya dengan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah yang merupakan gabungan dari seluruh Laporan Keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2020 yang telah disusun diserahkan kepada

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada tanggal 10 Mei 2021 oleh Bapak Bupati Kepulauan Selayar kepada Kepala perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan Pemeriksaan atau diaudit pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang nantinya akan diberikan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Analisa Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 28.A/LHP/XIX.MKS/05/2021 tanggal 10 Mei 2021, Hasil Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut maka target Sasaran Kinerja ke-2 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini BPK atas laporan Keuangan tahun 2020 berupa WTP 100% tercapai.

Dalam rangka pemenuhan Indikator Kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dan akuntabilitas OPD, penghitungannya dilakukan dengan memberikan point pada masing-masing opini. Target point ditetapkan sebagai berikut :

Apabila mendapat opini “Tidak Wajar”, maka point yang diberikan adalah 1 (satu);

Apabila mendapat opini “Disclaimer”, maka point yang diberikan adalah 2 (dua);

Apabila mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), maka point yang diberikan adalah 3 (tiga); dan

Apabila mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), maka point yang diberikan adalah 4 (empat).

Berdasarkan target point tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Target point} \times 100}{\text{Target Point opini}} = \text{Persentase Realisasi}$$

$$\frac{4 \text{ (empat)} \times 100}{4} = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat dilakukan perhitungan capaian yaitu :

$$\frac{\text{Persentase Realisasi} \times 100}{\text{Persentase target}} = \text{Persentase capaian realisasi}$$

$$\frac{100\% \times 100}{100\%} = 100\%$$

Faktor Pendukung Keberhasilan

Dengan terlaksananya output dari setiap kegiatan di atas yang mendukung pencapaian opini WTP atas LKD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020, dengan Pendukung Capaian Kinerja sebagai berikut:

1. Adanya peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Adanya upaya seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kualitas LK-OPD-nya masing-masing.

Faktor Penghambat Keberhasilan

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 menjelaskan bahwa masih adanya kelemahan baik pada sistem pengendalian Intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Solusi (Rekomendasi)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya untuk menindaklanjuti kelemahan yang ada dan juga berusaha

meningkatkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

4. Sasaran Strategis 4 : Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah setiap Tahunnya

Tabel 9.

Indikator Kinerja Utama (IKU 4)

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
			2021	
1	2		4	5
1	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	100%	45,82%	45,82%

Definisi Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun jenis Pendapatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2021

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 69.153.493.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.683.994.732,66 atau mencapai 45,82% atau terdapat selisih kurang sebesar Rp. 37.469.498.267,34.

Berdasarkan realisasi tersebut di atas, capaian indikator pendapatan asli daerah tidak tercapai dengan persentase realisasi sebesar 54,18% dari 100% yang ditargetkan di tahun 2021, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- tidak tercapainya sektor pajak daerah dengan persentase pencapaian sebesar 8,75% tidak terlampaui sebesar Rp. 924.395.424,00;

- tidak tercapainya sektor retribusi daerah dengan persentase pencapaian sebesar 27,30% tidak terlampaui sebesar Rp. 701.186.575,00;
- tidak tercapainya sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan persentase pencapaian sebesar 21,12% tidak terlampaui sebesar Rp. 2.305.326.622,52; dan
- tidak tercapainya sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan persentase pencapaian 74,35% tidak terlampaui sebesar Rp. 33.538.589.645,82.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sebagai berikut :

Tabel 10.

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		%
		TARGET	REALISASI	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	69.153.493.000,00	31.683.994.732,66	45,82
1.	Pajak daerah	10.560.782.000,00	9.636.386.576,00	91,25
2.	Retribusi daerah	2.568.372.000,00	1.867.185.425,00	72,70
3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.916.250.000,00	8.610.923.377,48	78,88
4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	45.108.089.000,00	11.569.499.354,18	25,65

Sumber : LRA per 31 Desember 2021

1. Hasil Pajak Daerah

Target pendapatan dari sektor Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 10.560.782.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.636.386.576,00 atau mencapai 91,25%. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa realisasi pajak daerah yang tidak mencapai target diantaranya pajak hotel mencapai 45,07%, pajak restoran mencapai 68,58%, pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai 77,23%, pajak penerangan jalan mencapai 98,82%, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mencapai 86,93%. Akan tetapi terdapat penerimaan pajak yang melebihi target yaitu pajak hiburan mencapai 792,46%, pajak reklame mencapai 331,32%, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran (PBBP2) mencapai 120,22% dan pajak air tanah mencapai 284,64%.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan dari sektor pajak daerah sebagai berikut :

Tabel 11.
Target dan Realisasi Hasil Pajak Daerah Tahun 2021

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	Lebih/Kurang	%
I.	Pajak Daerah	10.560.782.000,00	9.636.386.576,00	(924.395.424,00)	91,25
1.	Pajak hotel	194.750.000,00	87.768.749,00	(106.981.251,00)	45,07
2.	Pajak restoran	3.288.749.400,00	2.255.395.391,00	(1.033.354.009,00)	68,58
3.	Pajak hiburan	4.612.500,00	36.552.000,00	31.939.500,00	792,46
4.	Pajak reklame	59.450.000,00	196.972.128,00	137.522.128,00	331,32
5.	Pajak penerangan Jalan	3.032.975.000,00	2.997.231.808,00	(35.743.192,00)	98,82
6.	Pajak mineral bukan logam dan batuan	912.250.000,00	704.546.870,00	(207.703.130,00)	77,23
7.	Pajak air tanah	3.245.100,00	9.237.000,00	5.991.900,00	105,50
8.	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	1.937.250.000,00	2.328.917.955,00	391.667.955,00	120,22
9.	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	1.127.500.000,00	980.090.275,00	(147.409.725,00)	86,93

Sumber : LRA per 31 Desember 2021

2. Hasil Retribusi Daerah

Target pendapatan dari sektor retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 sebesar Rp 2.568.372.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.867.185.425,00 atau mencapai 72,70% yang bersumber dari komponen retribusi daerah :

1. Capaian Retribusi Jasa Umum mencapai 115,32% atau terlampaui sebesar Rp 89.609.573,00; terealisasi sebesar Rp 674.689.773,00 dari target sebesar Rp 585.080.200,00. Adapun komponen yang mempengaruhi realisasi tersebut adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi pelayan tera/tera ulang. Akan tetapi terdapat penerimaan retribusi jasa umum yang melebihi target yaitu penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebesar 174,12%, penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 137,58%, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 104,51%, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar

123, 28 %, retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi sebesar 103, 13%

2. Capaian Retribusi Jasa Usaha hanya mencapai 64,24% atau tidak terlampaui sebesar Rp 597.108.648,00 hanya terealisasi sebesar Rp 1.072.533.152,00 dari target sebesar Rp 1.669.641.800,00. Adapun komponen yang mempengaruhi realisasi tersebut adalah rendahnya penerimaan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pasanggarahan/vila, retribusi pelayanan kepelabuhan, akan tetapi terdapat penerimaan retribusi yang melebihi target yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 103, 92% dan tidak ada realisasi retribusi dari target yang ditetapkan yaitu retribusi penyeberangan di air.
3. Capaian Retribusi Perizinan Tertentu hanya mencapai 38,25% tidak terlampaui sebesar Rp 193.687.500,00 atau realisasi sebesar Rp 119.962.500,00 dari target sebesar

Rp 313.650.000,00 Adapun komponen yang mempengaruhi capaian realisasi tersebut yaitu rendahnya capaian pada retribusi izin mendirikan bangunan dan tidak ada realisasi dari retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor retribusi daerah sebagai berikut :

Tabel 12.

Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2021

URAIAN		TARGET	REALISASI	%
HASIL RETRIBUSI DAERAH		2.568.372.000,00	1.867.185.425,00	72,70
	Retribusi Jasa Umum	585.080.200,00	674.689.773,00	115,32
	R. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	225.500.000,00	310.240.000,00	137,58
	R. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	147.969.000,00	154.644.000,00	104,51
	R. Pelayan Kesehatan	16.041.200,00	27.931.500,00	174,12
	R. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	15.170.000,00	0	0,00
	R. Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	153.750.000,00	158.558.273,00	103,13
	R. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.275.000,00	13.900.000,00	123,28
	R. Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.375.000,00	9.416.000,00	61,24
	Retribusi Jasa Usaha	1.669.641.800,00	1.072.533.152,00	64,24
	R. Pemakaian Kekayaan Daerah	207.972.400,00	216.118.000,00	103,92
	R. Pasar Grosir dan/Atau Pertokoan	307.500.000,00	127.188.900,00	41,36

	R. Tempat Pelelangan	223.529.900,00	89.950.000,00	40,24
	R. Terminal	23.575.000,00	5.512.000,00	23,38
	R. Tempat Khusus Parkir	68.669.900,00	10.554.000,00	15,37
	R. Tempat Penginapan/Pasanggarahan/Villa	256.250.000,00	52.588.752,00	20,52
	R. Pelayanan Kepelabuhanan	579.069.600,00	570.621.500,00	98,54
	R. Penyebrangan Di Air	3.075.000,00	-	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	313.650.000,00	119.962.500,00	38,25
	R. Izin Mendirikan Bangunan	307.500.000,00	119.962.500,00	39,01
	R. Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	6.150.000,00	-	-

Sumber LRA per 31 Desember 2021

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada bagian laba yang di bagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) realisasi penerimaannya mencapai 79,63% atau sebesar Rp 8.610.923.377,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 10.813.750.000,00, dan tidak ada realisasi penerimaan pada bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Bidang Air Minum) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 102.500.000,00. Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut :

Tabel 13.
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Tahun 2021

URAIAN		TARGET	REALISASI	%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		10.916.250.000,00	8.610.923.377,00	78,88
	Bagian Laba Yang Di Bagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Pernyataan Modal Pada BUMD BPR (Lembaga Keuangan)	10.813.750.000,00	8.610.923.377,00	79,63
	Bagian Laba Yang Di Bagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Pernyataan Modal Pada BUMD BPR (Bidang Air Minum)	102.500.000,00	-	-

Sumber LRA per 31 Desember 2021

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, realisasi penerimaannya hanya mencapai 25,65% atau sebesar Rp 11.569.499.354,18 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 45.108.089.000,00.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai berikut

:

Tabel 14.
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah Tahun 2021

URAIAN		TARGET	REALISASI	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH		45.108.089.000,00	11.569.499.354,18	25,65
	Penerimaan Jasa Giro	1.793.750.000,00	1.476.375.103,00	82,31
	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.044.025.000,00	2.592.678.453,63	51,40
	Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain	12.461.389.000,00	7.500.445.797,55	60,19
	Pendapatan BLUD	25.808.925.000,00	0,00	0,00

Sumber LRA per 31 Desember 2021

Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor pendukung peningkatan laju pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah bersumber pada:

1. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
2. Penggalian potensi objek/subjek baru baik Pajak maupun Retribusi Daerah.
3. Peningkatan sarana prasarana, peningkatan mutu pelayanan baik segi perizinan, maupun administrasi pemungutan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor penghambat keberhasilan

1. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah.
2. Koordinasi penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi antar SKPD masih rendah.

Solusi (Rekomendasi)

Berdasarkan beberapa penghambat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya untuk meningkatkan kinerja OPD serta BUMD dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi atas sumber-sumber pendapatan asli daerah dan perlu dilaksanakan sosialisasi yang intensif dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi daerah atas kewajibannya.

Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung oleh program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

C. Realisasi Keuangan

Analisis capaian keuangan dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas LRA, NERACA, dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta diterapkannya sistem dan prosedur akuntansi secara berkesinambungan.

Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 sebesar Rp 23.861.104.492,00 terealisasi sebesar Rp 22.510.890.655,00 atau 94,34%. Adapun uraian belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15.
Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3		
	Belanja Langsung	23.861.104.492,-	22.510.991.255,-	94,34
1.	Belanja Pegawai	10.174.417.071,-	9.750.334.551,-	95,83
2.	Belanja Barang dan Jasa	13.120.449.421,-	12.244.324.704,-	93,32
3.	Belanja Modal	566.238.000,-	516.332.000,-	91,19

Dari pagu anggaran yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2021 sebesar Rp 23.861.374.492,00

selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 4 (empat) program yang tertuang di 92 (sembilan puluh dua) kegiatan.

Alokasi pagu anggaran dan realisasi perprogram tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16.

Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah per Program

PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.302.000.792,00	16.641.189.790	96,18
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.114.476.000,00	3.082.492.391	97,30
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	972.520.000,00	794.453.650	81,69
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.410.377.700,00	1.992.855.424	82,68
JUMLAH TOTAL	23.861.374.492,00	22.510.991.255	94,34

Terlihat pada tabel di atas, realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp 22.510.991.255,- atau 94,34%.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021

penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tertuang dalam tabel berikut.

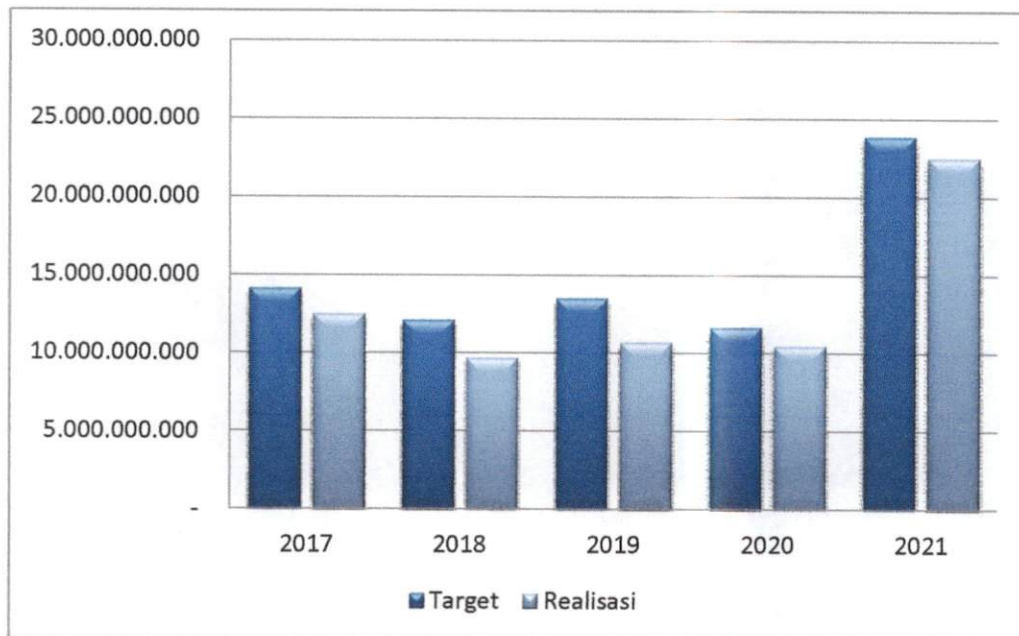
Tabel 17.

Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 Tahun 2020 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	14.142.654.194,00	12.129.625.000,00	13.525.912.944,00	11.688.352.914,00	23.861.374.492,00
Realisasi	12.517.843.937,00	9.703.195.296,00	10.713.892.072,00	10.499.755.419,00	22.510.991.255,00
%	88,51	80	79,21	89,83	94,34

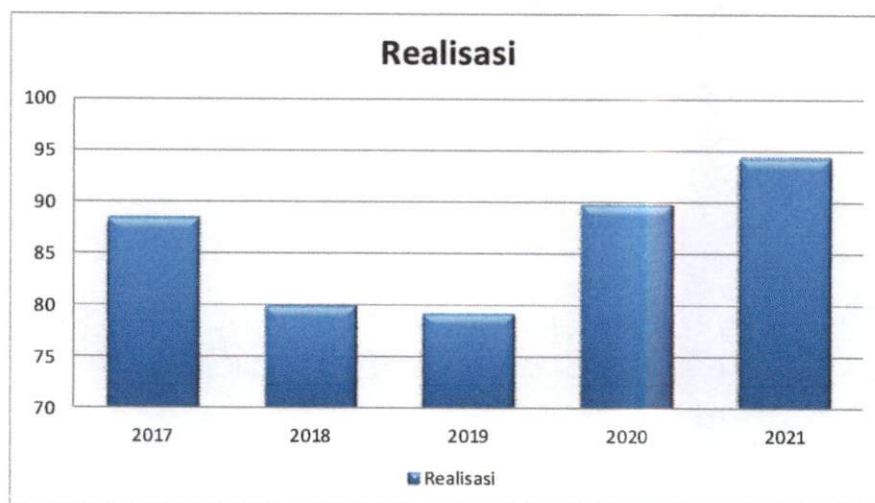
Grafik 1.

Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021



Grafik 2.

Persentase Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021



Berikut menyajikan data capaian realisasi target anggaran per kegiatan.

Tabel 18.

Realisasi Target Anggaran per Program per Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA		INDIKATOR KINERJA HASIL/ KELUARAN		%
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.302.000.792	16.641.189.790	32 Kegiatan	32 Kegiatan	96,18 %
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.530.000	49.631.000	7 Kegiatan / 12 Bulan	7 Kegiatan / 12 Bulan	92,72 %
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun, Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan, Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	3.040.000	2.654.000	1 Dokumen	1 Dokumen	87,30 %
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen RKA pokok yang tersusun	10.000.000	8.936.000	1 Dokumen	1 Dokumen	89%
3	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	7.000.000	6.560.000	1 Dokumen	1 Dokumen	94%
4	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen DPA Pokok yang tersusun	10.000.000	9.176.000	1 Dokumen	1 Dokumen	92%
5	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	7.000.000	6.595.000	1 Dokumen	1 Dokumen	94%
6	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan</i>					

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan	10.000.000	9.333.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	93%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dan dilaporkan	6.490.000	6.377.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	98%
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.373.954.871	9.126.339.227	5 Kegiatan	5 Kegiatan	97,36
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Indikator Kinerja : Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	9.318.654.871	9.077.134.227	57 Orang	57 Orang	97,41 %
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD					
	Indikator Kinerja : Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	13.540.000	13.168.000	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun dan dilaporkan	16.760.000	12.160.000	1 Laporan	1 Laporan	72,55 %
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen tanggapan LHP yang disusun dan dilaporkan	10.000.000	10.000.000	1 Laporan	1 Laporan	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dan dilaporkan	15.000.000	13.877.000	18 Dokumen	18 Dokumen	92,51 %
C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	233.745.000	201.860.000	6 Kegiatan	6 Kegiatan	86,36 %

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

1	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Aparat OPD yang dikelola administrasi kepegawaiannya	15.000.000	-	57 Orang	-	0%
2	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	98.745.000	98.745.000	200 Orang	200 Orang	100%
3	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	5.000.000	4.989.000	1 Dokumen	1 Dokumen	99,78 %
4	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang tersedia	10.000.000	8.304.000	1 Dokumen	1 Dokumen	83,04 %
5	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tupoksi	50.000.000	37.222.000	13 Orang	13 Orang	74,44 %
6	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	55.000.000	52.600.000	30 Orang	30 Orang	95,64 %
D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.456.646.000	1.376.940.368	6 Kegiatan	6 Kegiatan	94,53 %
1	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	323.087.000	293.306.000	1 Paket	1 Paket	90,78
2	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	167.842.000	157.667.000	1 Paket	1 Paket	93,94 %
3	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	37.412.000	15.527.000	1 Paket	1 Paket	41,24 %

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

	yang tersedia					
4.	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	24.900.000	18.490.000	1 Dokumen	1 Dokumen	74,26 %
5	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Tamu yang terfasilitasi	25.300.000	25.060.000	650 Orang	650 Orang	99,05 %
6	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terselenggara	878.105.000	866.890.368.	250 SPD	250 SPD	98,72 %
E	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	241.436.000	233.971.000	2 Kegiatan	2 Kegiatan	96,91 %
1	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	201.360.000	194.495.000	9 Unit	9 Unit	96,59 %
2	<i>Pengadaan Mebel</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Mebel yang tersedia	40.076.000	39.476.000	8 Unit	8 Unit	98,50 %
F	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.434.132.921	5.178.532.167	3 Kegiatan	3 Kegiatan	95,30 %
1	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Layanan Wifi, Air dan Listrik	3.348.868.397	3.198.236.297	12 Bulan	12 Bulan	95,50 %
2	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Layanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000	0	30 Kali	-	0%
3	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.078.264.524	1.980.295.870	106 Orang	106 Orang	95,29 %
G	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	508.556.000	473.916.028	3 Kegiatan	3 Kegiatan	93,19 %

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan perorangan Dinas yang dipelihara	400.750.000	374.996.028	105 Unit	105 Unit	93,57 %
2	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	38.000.000	29.570.000	40 Unit	40 Unit	77,82 %
3	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	69.806.000	69.350.000	1 Gedung	1 Gedung	99,35 %
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.114.476.000	3.032.820.591	35 Kegiatan	35 Kegiatan	97,30 %
A	Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.563.790.000	1.545.107.943	13 Kegiatan	13 Kegiatan	98,81 %
1	<i>Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</i>					
	Jumlah koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	357.561.000	347.164.200	2 Kali/2 Dokumen	2 Kali/2 Dokumen	97,09 %
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah koordinasi dan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	363.539.000	362.107.800	2 Kali/2 Dokumen	2 Kali/2 Dokumen	99,61 %
3	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	20.000.000	19.570.000	59 SKPD	59 SKPD	97,85 %
4	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD	20.000.000	19.570.000	59 SKPD	59 SKPD	97,85 %
5	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD</i>					

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

	Indikator Kinerja : Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	20.000.000	19.555.000	59 SKPD	59 SKPD	97,78 %
6	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20.000.000	19.547.000	59 SKPD	59 SKPD	97,74 %
7	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah koordinasi dan penyusunan Nota Keuangan, Perda APBD dan Perkada APBD	239.903.000	238.058.400	1 Perda dan 1 Perkada	1 Perda dan 1 Perkada	99,23 %
8	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah koordinasi dan penyusunan Perubahan Nota Keuangan, Perda Perubahan APBD dan Perkada Perubahan APBD	270.678.000	269.124.743	1 Perda dan 1 Perkada	1 Perda dan 1 Perkada	99,43 %
9	<i>Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	20.592.000	19.854.300	7 Dokumen	7 Dokumen	96,42 %
10	<i>Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>					
	Indikator KinerjaJumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan	34.379.000	33.689.300	1 Kegiatan	1 Kegiatan	97,99 %
11	<i>Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Belanja Daerah	33.888.000	33.636.200	1 Kegiatan	1 Kegiatan	94,67 %
12	<i>Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah koordinasi perencanaan anggaran Pembiayaan APBD	13.250.000	13.231.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	99,86 %

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

13	<i>Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kab/Kota</i>					
	Indikator Kinerja : Persentase penganggaran Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	12 Bulan	12 Bulan	100%
B	Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	532.700.000	500.435.501	10 Kegiatan	10 Kegiatan	93,88 %
1	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah antara BUD dan Daerah	108.100.000	101.237.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	93,65 %
2	<i>Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>					
	Indikator Kinerja: Persentase Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	12.366.000	11.899.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	96,22 %
3	<i>Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>					
	Indikator Kinerja: Terwujudnya laporan keuangan periodik pemerintah daerah	65.134.000	59.131.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90,78 %
4	<i>Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>					
	Indikator Kinerja: Persentase Terlaksananya Pengelolaan JKK dan JKM	39.800.000	38.046.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	95,59 %
5	<i>Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Rekonsiliasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	55.000.000	52.439.547	1 Kegiatan	1 Kegiatan	95,34 %
6	<i>Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Rekonsiliasi transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan Bank	30.000.000	28.814.600	1 Kegiatan	1 Kegiatan	96,05 %

7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)					
	Indikator Kinerja: Terlaksananya penyusunan saldo neraca tahun berjalanJumlah koordinasi dan ketersediaan kartu kartu Kontrol Pencairan SP2D	25.000.000	24.754.800	1 Kegiatan	1 Kegiatan	99,02 %
8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					
	Indikator Kinerja : Jumlah koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	39.800.000	39.205.400	1 Kegiatan	1 Kegiatan	98,51 %
9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait					
	Indikator Kinerja: Persentase Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah antara BUD dan Daerah	55.000.000	49.183.200	12 Bulan	12 Bulan	89,42 %
10	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					
	Indikator Kinerja: Jumlah Gaji OPD, Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Verifikasi Dokumen SPP/SPM SKPD	102.500.000	95.724.954	1 Kegiatan	1 Kegiatan	93,39 %
C	Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	917.986.000	887.277.147	11 Kegiatan	11 Kegiatan	96,98 %
1	Koordinasi Pelaksana Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					
	Indikator Kinerja: Jumlah Waktu Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan (Rekonsiliasi)	25.200.000	24.978.600	1 Kali	1 Kali	99,12 %

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

	Realisasi Keuangan SKPD					
2	<i>Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Pertemuan Pengumpulan Data Aplikasi Penerimaan dan Pengeluaran dan Persentase Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	60.000.000	59.961.281.	12 Bulan	12 Bulan	99,94 %
3	<i>Koordinasi Penyusunan Laporan Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Keuangan Periodik Pemerintah Daerah	30.000.000	29.613.400	1 Laporan	1 Laporan	98,71 %
4	<i>Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Persentase Penyusunan Saldo Neraca	26.040.000	25.439.000	24 Kali	24 Kali	97,69 %
5	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD</i>					
	Indikator Kinerja : Tersusunnya Rancangan Perda Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	423.340.000	417.483.175	1 Perda	1 Perda	98,62 %
6	<i>Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>					
	Indikatorr Kinerja: Terlaksananya Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	31.306.000	31.198.600	1 Laporan	1 Laporan	99,66 %
7	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>					

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

	Indikator Kinerja : Terselenggaranya Sidang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	83.300.000	63.883.191	24 Kali	24 Kali	76,69 %
8	<i>Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>					
	Indikator Kinerja : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Akuntansi Daerah	23.800.000	23.425.100	1 Laporan	1 Laporan	98,42 %
9	<i>Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>					
	Indikatorr Kinerja : Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	95.000.000	93.360.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	98,27 %
10	<i>Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>					
	Indikatorr Kinerja : Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	95.000.000	93.391.500	1 Kegiatan	1 Kegiatan	98,31 %
11	<i>Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Tervalidasinya Utang Pihak Ketiga	25.000.000	24.543.300	1 Kegiatan	1 Kegiatan	98,17 %
D	Kegiatan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100.000.000	100.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1	<i>Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>					
	Indikator Kinerja: Persentase Kegiatan Pendampingan	100.000.000	100.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	972.520.000	794.453.650	10 Kegiatan	10 Kegiatan	81,69 %
A	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	972.520.000	794.453.650	10 Kegiatan	10 Kegiatan	81,69 %
1	<i>Penyusunan Standar Harga</i>					
	Indikator Kinerja : Tersusunnya Standar Satuan Harga Barang	100.000.000	93.927.348	1 Dokumen	1 Dokumen	93,93 %

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

2	<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Barang yang Dibutuhkan dan Jumlah Buku yang Disusun	29.515.000	28.448.400	44 Buku	44 Buku	96,39 %
3	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Persentase BMD yang Ditatausahakan	35.000.000	31.928.100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	91,22 %
4	<i>Inventarisasi Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Tervalidasi, Terlaksananya Inventarisasi Keseluruhan (Sensus) atas Barang Milik Pemerintah dan Terlaksananya Sensus Barang Milik Daerah	123.250.000	117.688.900	1 Kegiatan	1 Kegiatan	95,49 %
5	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Direkonsiliasi	265.310.000	160.396.602	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60,46 %
6	<i>Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Terlaksananya Pengelolaan Aplikasi Persediaan	49.690.000	44.197.600	1 Kegiatan	1 Kegiatan	88,95 %
7	<i>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Barang Daerah yang Dihapus/Dijual	197.360.000	153.607.400	1 Kegiatan	1 Kegiatan	77,83 %
8	<i>Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Aset Daerah	87.250.000	83.843.200	1 Kegiatan	1 Kegiatan	96,10 %
9	<i>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Persentase Aset Tetap yang Diversifikasi Setiap Tahun, Terlaksananya Kompilasi Neraca Aset Tetap Semua OPD dan Tersusunnya Laporan Aset Tetap Tahun	20.200.000	16.917.600	1 Laporan	1 Laporan	83,75 %

	Anggaran Berjalan					
10	<i>Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>					
	Indikator Kinerja : Persentase Aset Tetap Bermasalah, Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang Dilaksanakan, Jumlah Peraturan Perda yang Disusun dan Terlaksananya Pengelolaan Melalui Aplikasi	64.945.000	63.498.500	1 Kegiatan	1 Kegiatan	97,77 %
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.410.377.700	1.992.855.424	14 Kegiatan	14 Kegiatan	82,68 %
A	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.410.377.700	1.992.855.424	14 Kegiatan	14 Kegiatan	82,68 %
1	<i>Perencanaan pengelolaan pajak daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	571.679.100	464.639.028	1 Kegiatan	1 Kegiatan	81,28 %
2	<i>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Perda Pajak Daerah yang Tersusun	200.000.000	199.049.300	2 Perda	2 Perda	99,52
3	<i>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	30.000.000	22.332.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	74,44 %
4	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Persentase Kertas SPPT, STTS dan TTS PBB-P2 dan Jumlah Peta Blok	100.000.000	99.595.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	99,60 %
5	<i>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Lokasi Intensifikasi Pajak & Retribusi daerah dan Jumlah Pendaftar & Lokasi Pendataan PBB-P2 & BPHTB	451.000.000	249.559.000	20 Objek	20 Objek	55,33 %
6	<i>Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Persentase Waktu Pemeliharaan Aplikasi	70.000.000	68.785.400	1 Kegiatan	1 Kegiatan	98,26 %

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

yang capaian kinerjanya 100% dan 1 (satu) indikator kinerja utama di bawah 100%.

Berdasarkan penjelasan di atas masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yang capaiannya masih di bawah 100% yaitu indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan asli daerah sesuai potensi daerah hanya tercapai 45,82%. Untuk itu masih dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian tersebut dengan cara berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi atas sumber-sumber pendapatan asli daerah dan sosialisasi yang intensif dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi daerah atas kewajibannya.

Benteng Selayar, 2 Februari 2022

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah,**



Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19740626 199311 1 002

LAMPIRAN – LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. MESDIYONO, M.Ec. Dev**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. MUH. BASLI ALI**
Jabatan : Bupati Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,

H. MUH. BASLI ALI

Pihak Pertama,

Drs. MESDIYONO, M. EC. Dev.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740626 199311 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA BPKPD	TARGET
1	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	CC
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Sesuai
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3%

NO PROGRAM

ANGGARAN

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	15.877.463.219
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	140.545.014.150
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	892.323.000
4. Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.965.623.700
	159.280.424.069

Benteng, 3 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR



H. MUH. BASLI ALI

KEPALA BADAN,



Drs. MESDIYONO, M.Ec., Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740626 199311 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H U S A I N, S.Sos**
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MESDIYONO, M.Ec. Dev**
Jabatan : Plt.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,

Drs. MESDIYONO, M. EC. Dev.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740626 199311 1 002

Pihak Pertama,

H U S A I N, S. Sos
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19710623 199402 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
SEKRETARIS BADAN

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
A	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
I	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
II	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	

2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
III Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Laporan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
IV Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyusunan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyusunan Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	

[illegible]

		3 Menyediakan Pembayaran Pemeliharaan Perbaikan Printer																	
Total Anggaran			15.877.463.219,00																

Plt. KEPALA BADAN,



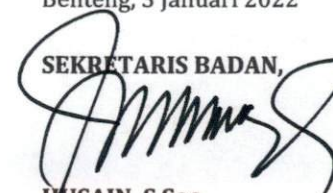
Drs. MESDIYONO. M.Ec., Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19740626 199311 1 002

Benteng, 3 Januari 2022

SEKRETARIS BADAN,



HUSAIN. S.Sos.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19710623 199402 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHYUNINGSIH, S.E,M.M**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MESDIYONO, M.Ec. Dev**
Jabatan : Plt.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,

Drs. MESDIYONO, M. EC. Dev.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740626 199311 1 002

Pihak Pertama,

WAHYUNINGSIH, S.E, M.M
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19780213 200803 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG ANGGARAN DAERAH

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
A	Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
I	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	Tersusunnya KUA dan PPAS	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Penyusunan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD	Penyusunan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	

II Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	

Plt. KEPALA BADAN,



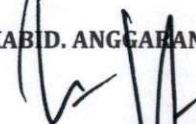
Drs. MESDIYONO, M.Ec.,Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19740626 199311 1 002

Benteng, 3 Januari 2022

KABID. ANGGARAN DAERAH,



WAHYUNINGSIH, S.E.,MM.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19780213 200803 2 002

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG ANGGARAN DAERAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E, Mak, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MESDIYONO, M.Ec. Dev**
Jabatan : Plt.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,

Drs. MESDIYONO, M. EC. Dev.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740626 199311 1 002

Pihak Pertama,

NURSAL IKHSAN, S.E, Mak, M.Si
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19830525 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
A	Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
1	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Penyusunan Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

9	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah			
2	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				
1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	

Benteng, 3 Januari 2022

Plt. KEPALA BADAN,

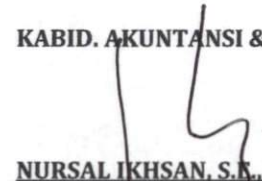


Drs. MESDIYONO. M.Ec., Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19740626 199311 1 002

KABID. AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN DAERAH,



NURSAL IKHSAN. S.E., M.Ak., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19830525 200604 1 016

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah														
A	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		350.000.000,00												
1	Pelaksanaan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Menyusun SK Tim Pelaksana Kegiatan													
		2 Menyampaikan surat undangan pelatihan ke SKPD													
		3 Melaksanakan pelatihan pembinaan sistem informasi Pemerintah Daerah													
		4 Membuat Laporan hasil pelatihan dalam rangka pembinaan sistem Informasi Pemerintahan Daerah													
Total Anggaran			741.426.150,00												

Benteng, 3 Januari 2022

Plt. KEPALA BADAN,

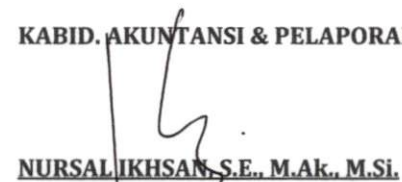


Drs. MESDIYONO, M.Ec., Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19740626 199311 1 002

KABID. AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN DAERAH,



NURSALIKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19830525 200604 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZULFADLI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MESDIYONO, M.Ec. Dev**
Jabatan : Plt.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,

Drs. MESDIYONO, M. EC. Dev.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740626 199311 1 002

Pihak Pertama,

ZULFADLI, S.E.
Pangkat : Penata, III/c
NIP. 19780612 200604 1 024



PURBAWALAH KEMERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SULFADLI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Daerah
Kabupaten Kabupaten Bekasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MESDIYONO, M.Sc. Dev**
Jabatan : Pj. Kepala Badan Pengendalian Keuangan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kabupaten Bekasi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini beranggotakan sebagai berikut:
1. Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target, untuk jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan program akan target ideal, tercapai menjadi target.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diberikan serta akan melakukan evaluasi keterlaksanaan kinerja dan capaian kinerja dari perjanjian ini. Hal yang perlu diketahui yang diberikan dalam rangka perjanjian ini.

Bekasi, 5 Januari 2022

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

SULFADLI, S.E.
Bekasi, 5 Januari 2022
NIP. 19780612 200604 1 034

Drs. MESDIYONO, M.Sc. Dev
Bekasi, 5 Januari 2022
NIP. 19740625 199111 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	Tersedianya Laporan Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyusunan SK Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	SK	Tersedianya SK Pengelola Keuangan Daerah	
		Penerbitan SPD untuk semua OPD	SPD	Tersedianya Dokumen SPD untuk semua OPD	
		Penerbitan SP2D berdasarkan SPM yang diajukan oleh OPD	SP2D	Terbitnya Dokumen SP2D	
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Bank BPD SulSelBar	Laporan	Tersedianya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
4	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah	Laporan	Terlaksananya Koordinasi Penerimaan Piutang dan Pelunasan Utang Daerah dengan Pihak Ketiga	
		Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah	Laporan	Terlaksananya Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah pada Beberapa Bank dalam Bentuk Deposito	
5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Verifikasi Dokumen Pencairan SKPD	Dokumen	Terlaksananya Verifikasi Dokumen Pencairan SKPD	
		Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Laporan	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	
6	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas Daerah, dan Pelaksanaan	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
		Penyusunan Laporan Aliran Kas	Laporan	Tersusunnya Laporan Aliran Kas	

	Pemungutan/Pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penyusunan Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	Tersusunnya Laporan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran	
7	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas SKPD	Laporan	Tersusunnya data hasil rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas SKPD	
		Rekonsiliasi Pemungutan Pajak SKPD melalui Mekanisme GU/TU/LD	Laporan	Tersusunnya data hasil rekonsiliasi pemungutan pajak SKPD	
8	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Perekaman data Gaji ASN dan Penerbitan daftar Gaji untuk OPD	Dokumen	Tersedianya Daftar gaji Semua Organisasi Perangkat Daerah	
		Penelitian Kelengkapan Dokumen Pencairan gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai yang diajukan oleh Pengguna Anggaran Untuk Penerbitan SP2D Gaji OPD	Dokumen	Tersedianya SP2D Gaji Induk, SP2D TPP, Kekurangan Gaji dan Gaji susulan Semua Organisasi Perangkat Daerah	
		Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi Pegawai yang Pensiun, Pegawai Wafat dan Pegawai Yang Pindah	Dokumen	Tersedianya SKPP	
		Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak PT Taspen (PERSERO) terkait iuran Wajib Pegawai setiap Tiga bulan sekali dalam setahun	Dokumen	Tersedianya data Realisasi yang cocok antara Pemda dan PT. Taspen (PERSERO)	
9	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Membuat Rekapitulasi Potongan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Sebagai Dasar Tagihan Pihak PT Taspen (PERSERO) Kepada Pemerintah Daerah	Dokumen	Tersedianya data Potongan iuran JKK dan JKM	
		Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak PT Taspen (PERSERO) terkait Penerimaan iuran JKK dan JKM setiap Tiga bulan sekali dalam setahun	Dokumen	Tersedianya data Realisasi yang cocok antara Pemda dan PT. Taspen (PERSERO)	
		Membuat Rekapitulasi Potongan BPJS 4 % dan IWP 1%	Dokumen	Tersedianya data Potongan BPJS 4% dan IWP 1%	
		Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak BPJS Kesehatan terkait iuran 1% bagi Pekerja dan iuran 4% bagi Pemberi setiap empat bulan sekali dalam setahun	Dokumen	Tersedianya data Realisasi yang cocok antara Pemda dan BPJS Kesehatan	

10	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perkiraan Belanja Daerah, Rekapitulasi Transaksi harian Belanja Daerah dan laporan Posisi Kas Bulanan	Laporan	Terlaksananya Pelaporan Belanja Daerah	
		Melakukan perekaman data sebagai syarat Penyaluran DAK FISIK	Laporan	Terlaksananya penyaluran Dana DAK dari RKUN ke RKUD	
		Membuat Laporan Realisasi Pembayaran Gaji Induk PNSD dengan TPP dan Realisasi Pembayaran gaji Induk PPPK dengan TPP	Laporan	Terlaksananya Pelaporan Belanja Pegawai	

Benteng, 3 Januari 2022

Plt. KEPALA BADAN,



Drs. MESDIYONO. M.Ec., Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19740626 199311 1 002

KABID PERBENDAHARAAN DAERAH,



ZULFADLI. S.E.

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19780612 200604 1 024

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	2.	Mengirim Dokumen yang sudah disetujui melalui aplikasi																		
Total Anggaran			361.781.000																	

Plt. KEPALA BADAN,



Drs. MESDIYONO, M.Ec., Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19740626 199311 1 002

Benteng, 3 Januari 2022

KABID PERBENDAHARAAN DAERAH,



ZULFADLI S.E.

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19780612 200604 1 024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MESDIYONO, M.Ec. Dev**
Jabatan : Plt.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,

Drs. MESDIYONO, M. EC. Dev.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740626 199311 1 002

Pihak Pertama,

NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720804 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program : Pengelolaan Barang Milik
Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Harga yang Disusun	Dokumen	Tersedianya Standar Harga	
2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	
5	Pengamanan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	
6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
9	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	

10	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyusunan Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
----	--	---	-------	---	--

Plt. KEPALA BADAN,



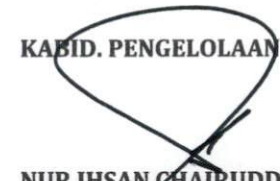
Drs. MESDIYONO, M.Ec., Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19740626 199311 1 002

Benteng, 3 Januari 2022

KABID. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,



NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19720804 200312 1 006

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program : Pengelolaan Barang Milik

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

[illegible]

[illegible]

[illegible]

J	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		32.400.000																
	Penyusunan Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Pembentukan Tim pelaksana kegiatan																	
		2 Rapat internal Tim																	
		3 Membuat surat permintaan nara sumber ke BPKPD Provinsi																	
		4 Membuat undangan pelatihan ke semua OPD																	
		5 Pelaksanaan pelatihan pengelolaan BMD																	
Total Anggaran			892.323.000																

Plt. KEPALA BADAN,



Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19740626 199311 1 002

Benteng, 3 Januari 2022

KABID. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,

NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19720804 200312 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI RUMBIYAH MANAJAI, S.P, M.M**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MESDIYONO, M.Ec. Dev**
Jabatan : Plt.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,

Drs. MESDIYONO, M. EC. Dev.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740626 199311 1 002

Pihak Pertama,

ANDI RUMBIYAH MANAJAI, S.P, M.M
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19751031 200604 2 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan pembangunan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik, kami yang berwenang akan melaksanakan:

Nama : **ANDI RUMBIYAH MANALAI, S.P., M.M.**
 Jabatan : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Kabupaten : Kabupaten Ponorogo

Sebelumnya, disetujui oleh:

Nama : **Drs. MESDIYONO, M.Pd., Dv.**
 Jabatan : Plt. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Kabupaten : Kabupaten Ponorogo

3. Setelah itu, disetujui oleh:

Untuk pelaksanaan pada tahun 2022 ini, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, kami akan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kabupaten Ponorogo tahun 2022-2024.

Kami kedua akan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kabupaten Ponorogo tahun 2022-2024.

Demikian, ini dibuat di Ponorogo, 25 Mei 2022.

Andi Rumbiyah Manalai

Drs. Mesdiyono

ANDI RUMBIYAH MANALAI, S.P., M.M.
 Pangkat : Kepala Tk. I
 NIP. 19751011 2003 2 019

Drs. MESDIYONO, M.Pd., Dv.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19740625 1973 11 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

POGRAM : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

KEGIATAN : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	a. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah b. Penyusunan Dokumen Penyusunan Target PAD c. Penyusunan Laporan Potensi Pajak Daerah	Dokumen Dokumen Laporan	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Tersusunnya target PAD Terkelolanya data dan Potensi Pajak Daerah	
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	a. Penyusunan Dokumen Hasil Analis dan Pengebangan Pajak Daerah b. Penyusunan Perbup Penerapan Harga Minyak Bahan Logam dan Batuandan Perubahan Perbup Besaran Tarif Kekayaan Daerah No 85 Tahun 2021	Dokumen Perbup	Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah. tersedianya Perda, Perbup dan Surat keputusan tentang Pajak daerah	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	a. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah b. Jumlah kegiatan Pekan Panutan Pajak c. Jumlah Desa/kelurahan di 11 kecamatan yang dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Penerimaan PBB-P2	Laporan Laporan hasil Kegiatan Laporan hasil Kegiatan	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Terlaksananya Pekan Panutan Pajak Kabupaten Kepulauan Selayar Terlaksananya kegiatan monev PBB di 11 Kecamatan	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	a. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah b. Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	a. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak b. Peningkatan jumlah wajib pajak terdata yang memiliki NPWPD c. Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Dokumen Dokumen Laporan	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran Jumlah wajib Pajak yang memiliki NPWPD yang diolah dan didata Terlaksananya intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	a. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	a. Jumlah SPPT PBB-P2 yang tersalurkan	Dokumen SPPT-PBB	Terlaksananya Penyaluran SPPT PBB-P2	

		b. Jumlah PBB-P2 dan BPHTB baru yang diverifikasi	Laporan	Terlaksananya penelitian dan verifikasi berkas pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB Baru	
		c. Jumlah piutang PBB-P2 yang diverifikasi	laporan	Jumlah Piutang PBB- P2 yang diverifikasi	
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	a. Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah b. Jumlah Perhitungan Penetapan untuk Penerbitan dan pendistribusian SKPD/SKRD c. Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian Pengelolaan Benda-benda berharga/karcis retribusi	Dokumen Ketetapan Dokumen Perhitungan Kegiatan	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah tersedianya Dokumen perhitungan penetapan untuk penerbitan SKPD/SKRD Tersedianya benda berharga/karcis retribusi yang terperforasi	
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	a. Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. b. Jumlah dokumen pelayanan dan konsultasi yang dilaksanakan	Laporan Dokumen	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	a. Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah b. Jumlah opd pengelola PAD yang direkonsiliasi dan dikonsolidasikan laporan pajak dan retribusinya	Dokumen Laporan hasil Rekonsiliasi	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Terlaksananya rekonsiliasi dan konsolidasi dengan OPD pengelola PAD	
11	Penagihan Pajak Daerah	a. Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. b. Jumlah Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang didistribusikan kepada Wajib Pajak	Dokumen SKPD piutang pajak Dokumen SPTPD	Terlaksananya Penagihan piutang Pajak Daerah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib pajak	
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	a. Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	a. Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan b. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah c. Jumlah Objek Pajak daerah yang dimonitoring	Dokumen LHP Laporan Laporan hasil kegiatan	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah terlaksananya kegiatan monitoring Objek Pajak Daerah	
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	a. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	

		b. Jumlah konsultasi, koordinasi dan monitoring Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Terlaksananya konsultasi, koordinasi dan monitoring Pengelolaan Retribusi Daerah	
--	--	--	---------	--	--

Plt. KEPALA BADAN,



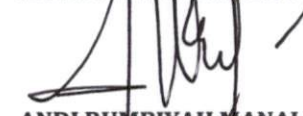
Drs. MESDIYONO, M.Ec., Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19740626 199311 1 002

Benteng, 3 Januari 2022

KABID. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH,



ANDI RUMBIYAH MANAJAL, S.P., MM.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19750131 200604 2 019

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2022
BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

POGRAM	:	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
SUB. BAGIAN PROGRAM

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	


SEKRETARIS BADAN,
HUSAIN, S.Sos.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19710623 199402 1 003

Benteng, 3 Januari 2022

KASUBAG. PROGRAM,


AGUNG PURNAMA, S.Sos.
Pangkat : Penata, III/c
NIP. 19830823 201001 1 007

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
SUB. BAGIAN PROGRAM

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

[illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
SUB. BAGIAN KEUANGAN

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

SEKRETARIS BADAN,

HUSAIN. S.Sos.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19710623 199402 1 003

Benteng, 3 Januari 2022

KASUBAG. KEUANGAN,

RITAWATI.S.S.

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19831229 201101 2 013

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
SUB. BAGIAN KEUANGAN

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Benteng, 3 Januari 2022

~~SEKRETARIS~~ BADAN,

SEKRETARIS BADAN,

HUSAIN, S.Sos.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19710623 199402 1 003

KASUBAG. KEUANGAN,

KASABAG. KEUANGAN,

RITAWATI, S.S.

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19831229 201101 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
SUB. BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
A	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
I	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Laporan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
II	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyusunan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyusunan Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyusunan Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyusunan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyusunan Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
III	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyusunan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	

IV	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	
V	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyusunan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Laporan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyusunan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Benteng, 3 Januari 2022

SEKRETARIS BADAN,



HUSAIN. S.Sos.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19710623 199402 1 003

KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN & HUKUM



ROSNIAH. S.E., MM.

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP. 19750404 201101 2 002

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	Tersedianya Laporan Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengedalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyusunan SK Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	SK	Tersedianya SK Pengelola Keuangan Daerah	
		Penerbitan SPD untuk semua OPD	SPD	Tersedianya Dokumen SPD untuk semua OPD	
		Penerbitan SP2D berdasarkan SPM yang diajukan oleh OPD	SP2D	Terbitnya Dokumen SP2D	
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Bank BPD SulSelBar	Laporan	Tersedianya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
4	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah	Laporan	Terlaksananya Koordinasi Penerimaan Piutang dan Pelunasan Utang Daerah dengan Pihak Ketiga	
		Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah	Laporan	Terlaksananya Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah pada Beberapa Bank dalam Bentuk Deposito	

Bonteng, 3 Januari 2022

KABID PERBENDAHARAAN DAERAH,



ZULFADLI S.E.

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19780612 200604 1 024

ANALIS KEUANGAN PUSAT & DAERAH,



ANDI FITRIANI S.E.

Pangkat : Penata Tk. I, III/d

NIP. 19820905 200903 2 001

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

[illegible]

[illegible]

	2 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemda dengan Bank dengan Pertimbangan Manfaat Optimal dari Suku Bunga Deposito																		
	3 Penatausahaan, yaitu Penyimpanan Deposito, Pencatatan Pendapatan Bunga Deposito dan Digitalisasi Arsip Deposito																		
	4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dimana Penempatan Deposito dan Bunga dilaporkan kepada Bupati serta dilaporkan dalam LKPD																		
Total Anggaran		120.713.000																	

KABID PERBENDAHARAAN DAERAH,

ZULFADLI S.E.

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19780612 200604 1 024

Benteng, 3 Januari 2022

ANALIS KEUANGAN PUSAT & DAERAH,

ANDI FITRIANI S.E.

Pangkat : Penata Tk. I, III/d

NIP. 19820905 200903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	a. Verifikasi Dokumen Pencairan SKPD b. Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Dokumen Laporan	a. Terlaksananya Verifikasi Dokumen Pencairan SKPD b. Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas Daerah, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	a. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah b. Penyusunan Laporan Aliran Kas c. Penyusunan Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan Laporan Laporan	a. Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah b. Tersusunnya Laporan Aliran Kas c. Tersusunnya Laporan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran	
3	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	a. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas SKPD b. Rekonsiliasi Pemungutan Pajak SKPD melalui Mekanisme GU/TU/LD	Laporan Laporan	a. Tersusunnya data hasil rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas SKPD b. Tersusunnya data hasil rekonsiliasi pemungutan pajak SKPD	

Benteng, 3 Januari 2022

KABID PERBENDAHARAAN DAERAH,



ZULFADLI, S.E.

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19780612 200604 1 024

KASUBID. PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH



NUR HIDAYAH MUCHTAR, S.E., Ak

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 197102172010012003

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Benteng, 3 Januari 2022

KABID PERBENDAHARAAN DAERAH,

ZULFADLI, S.E.

Pangkat : Penata, III/c
NIP. 19780612 200604 1 024

**KASUBID. PEMBINAAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH**

NUR HIDAYAH MUCHTAR, S.E., Ak

Pangkat : Penata, III/c
NIP. 197102172010012003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Perekaman data Gaji ASN dan Penerbitan daftar Gaji untuk OPD	Dokumen	Tersedianya Daftar gaji Semua Organisasi Perangkat Daerah	
		Penelitian Kelengkapan Dokumen Pencairan gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai yang diajukan oleh Pengguna Anggaran Untuk Penerbitan SP2D Gaji OPD	Dokumen	Tersedianya SP2D Gaji Induk, SP2D TPP, Kekurangan Gaji dan Gaji susulan Semua Organisasi Perangkat Daerah	
		Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi Pegawai yang Pensiun, Pegawai Wafat dan Pegawai Yang Pindah	Dokumen	Tersedianya SKPP	
		Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak PT Taspen (PERSERO) terkait Iuran Wajib Pegawai setiap Tiga bulan sekali dalam setahun	Dokumen	Tersedianya data Realisasi yang cocok antara Pemda dan PT. Taspen (PERSERO)	
2	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Membuat Rekapitulasi Potongan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Sebagai Dasar Tagihan Pihak PT Taspen (PERSERO) Kepada Pemerintah Daerah	Dokumen	Tersedianya data Potongan iuran JKK dan JKM	
		Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak PT Taspen (PERSERO) terkait Penerimaan iuran JKK dan JKM setiap Tiga bulan sekali dalam setahun	Dokumen	Tersedianya data Realisasi yang cocok antara Pemda dan PT. Taspen (PERSERO)	
		Membuat Rekapitulasi Potongan BPJS 4 % dan IWP 1%	Dokumen	Tersedianya data Potongan BPJS 4% dan IWP 1%	
		Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak BPJS Kesehatan terkait iuran 1% bagi Pekerja dan iuran 4% bagi Pemberi setiap empat bulan sekali dalam setahun	Dokumen	Tersedianya data Realisasi yang cocok antara Pemda dan BPJS Kesehatan	

3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perkiraan Belanja Daerah, Rekapitulasi Transaksi harian Belanja Daerah dan laporan Posisi Kas Bulanan	Laporan	Terlaksananya Pelaporan Belanja Daerah	
		Melakukan perekaman data sebagai syarat Penyaluran DAK FISIK	Laporan	Terlaksananya penyaluran Dana DAK dari RKUN ke RKUD	
		Membuat Laporan Realisasi Pembayaran Gaji Induk PNSD dengan TPP dan Realisasi Pembayaran gaji Induk PPPK dengan TPP	Laporan	Terlaksananya Pelaporan Belanja Pegawai	

Benteng, 3 Januari 2022

KABID PERBENDAHARAAN DAERAH,



ZULFADLI S.E.

Pangkat: Penata, III/c

NIP. 19780612 200604 1 024

KASUBID PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN,



EMMA S.E.

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19780518 201410 2 001

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

[illegible]

[illegible]

3.	Melakukan perekaman data sebagai syarat Penyaluran DAK FISIK	1. Menyetujui Dokumen persyaratan penyaluran DAK yang telah direviu oleh APIP																	
		2. Mengirim Dokumen yang sudah disetujui melalui aplikasi																	
Total Anggaran			Rp 136.800.000																

Benteng, 3 Januari 2022

KABID PERBENDAHARAAN DAERAH,



ZULFADLI S.E.

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19780612 200604 1 024

KASUBID PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN,



EMMA S.E.

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19780518 201410 2 001